



Agama, Persoalan Sosial, dan Krisis Moral

Syamsul Bakri¹⁾

¹⁾ Penulis adalah dosen Peradaban Islam Jurusan Ushuluddin STAIN Surakarta, dan aktif di Lakpesdam-NU Klaten.

Abstract: *As a part of social system, Islam is a powerful and huge potential to build our country. Therefore, Islam must play as inclusive, democratic, and plural power. Islamic thought characteristic must have socio-cultural movement paradigm by trying to show Islam's form in daily life consciousness and build social institution system without religion banner. Socio-cultural movement inclines to awareness and empowerment act to society and its institution as its commitment to democracy and development of autonomous civil society. When Islamic thought function as this cultural power, sociologically Islam will appear as social salvation. Therefore, this religion will be more down to earth and relevant to socio-historic problem at daily life. Islam will have role to liberate human from poverty, human rights violation, backwardness, corruption, etc.* **Keywords:** religion, social system, social problem, empowerment, and liberation.

PENDAHULUAN

Era Reformasi merupakan arus balik sejarah sosial-politik di Indonesia. Arus balik sejarah ini sangat penting dalam upaya menemukan jati diri bangsa, dan dalam rangka membangun masyarakat di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, sudah 10 tahun reformasi digulirkan, ternyata belum mampu mengatasi persoalan bangsa. Hal ini karena reformasi tidak berjalan secara maksimal sehingga menyebabkan adanya krisis multi dimensi, baik di sektor ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan, dan keberagamaan masyarakat yang semuanya berakar pada dua hal, yaitu sistem dan sikap moral. Persoalan kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, dan korupsi yang sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, justru diperparah dengan persoalan-persoalan baru seperti kebijakan pemerintah yang tidak populis, benturan horisontal antarelemen masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem dan peningkatan moralitas anak bangsa.

MENJARING ASPIRASI

Pembicaraan-pembicaraan riil antara elemen masyarakat, organisasi keagamaan, kalangan akademisi, praktisi profesional, dan pemerintah perlu digalakkan, tidak sekadar seremonial saja, tetapi lebih pada penjarangan aspirasi. Penjarangan aspirasi seharusnya muncul dari inisiasi pemerintah dan dilakukan oleh pemerintah dengan penuh kesungguhan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gagasan-gagasan dari rakyat yang terpinggal dan tidak sistemik serta membicarakan bersama rakyat agar menjadi gagasan yang lebih tersistem dan menggugah kesadaran agar rakyat merasa memiliki gagasan-gagasan tersebut. Rakyat seharusnya sudah diberi pemahaman bahwa mereka memiliki daya dan kuasa untuk mengubah kehidupan mereka sendiri melalui dialog-dialog. Upaya dialogis harus terus dilakukan. Dialog dimaksudkan untuk mengubah realitas secara bersama-sama dengan orang lain, bukan orang lain yang harus diubah. Pemerintah perlu lebih memberi ruang publik (*public space*) yang luas untuk masyarakat agar dapat menemukan tema-tema generatif dan mengenali persoalan yang melingkupi masyarakatnya.

Dalam paradigma demokrasi, media aspirasi menjadi sangat dibutuhkan. Di sinilah peran *stake holder* dituntut untuk lebih berperan terutama para *religious leader*, aktivis lintas agama, tokoh masyarakat maupun para penyelenggara negara



untuk membuat rumusan-rumusan dan kebijakan publik yang diharapkan bersifat paralel dengan kondisi riil di masyarakat. Pengelibatan hak-hak sipil, politik, dan mengemukakan pendapat yang selama ini terjadi sudah saatnya diakhiri. Begitu juga, peran partisipasi aktif dari segenap elemen masyarakat harus ditingkatkan, jika penyelenggara negara tidak ingin seluruh kebijakannya dianggap berada di menara gading.

Upaya menjangkau aspirasi merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat bangsa. Dari aspirasi masyarakat yang terpinggirkan dan tidak sistemik ini, kemudian dilakukan refleksi bersama dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang berkompeten untuk kemudian dilakukan aksi di lapangan.

Aksi dimaksudkan untuk mengubah tatanan sosial yang lebih adil, manusiawi, rasional, dan damai. Semua ini tanggung jawab seluruh warga masyarakat sekaligus menjadi bentuk emansipasi dalam membangun masyarakat. Untuk itulah, maka diperlukan proses penyadaran kritis yang memungkinkan lahirnya kesadaran kritis (*critical consciousness*), yang menjadikan sistem dan struktur sebagai sumber persoalan, tidak sekadar fakta (fenomena) yang ada di lapangan. Artinya, perlu dilakukan analisis kritis atas struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, serta dampaknya dalam menciptakan situasi dan kondisi di masyarakat. Dengan demikian, daur transformasi penyelesaian krisis bangsa dapat dijelaskan secara runtut sebagai berikut: Problem kemanusiaan –Refleksi Kritis– Aksi Perubahan. Hal ini ditujukan untuk mengubah kondisi yang dehumanistik menuju kondisi yang lebih humanistik.

Oleh karena itu, upaya penyelesaian masalah bangsa hanya pada tataran fenomena tidak akan banyak menyelesaikan persoalan karena akar persoalan ada pada sistem dan struktur. Penanganan hukum atas kasus-kasus korupsi, suap, dan sebagainya tidak akan menyelesaikan banyak masalah jika tanpa diikuti dengan perbaikan sistem yang menyulitkan pelaku untuk melakukan korupsi. Hal ini perlu menjadi perhatian pihak seluruh komponen bangsa.

Sebagai contoh, pembangunan pedesaan sudah lama dilakukan dan menjadi jargon para kepala pemerintah. Akan tetapi, proses yang berlangsung lama ternyata belum membawa perubahan bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya sistem yang rapi, di samping itu juga tidak ada pemberdayaan dan penyadaran masyarakat.

KOMPLEKSITAS PERSOALAN BANGSA

Persoalan yang melanda bangsa ini sudah cukup kompleks, dari persoalan dampak bencana alam sampai persoalan yang muncul dari sistem dan tingkat moral masyarakatnya. Hal ini memunculkan krisis bangsa yang seharusnya segera diatasi.

Di bidang pendidikan, dapat kita lihat betapa sistem pendidikan belum memberi ruang yang luas kepada murid untuk mengatakan kata-kata dari pikirannya sendiri dan hanya sekadar kegiatan teknis yang mengajarkan pengertian-pengertian. Pikiran murid seolah-olah sekadar menjadi bank data informasi saja. Sistem pendidikan harus fungsional. Pada sisi lain, pendidikan sering dipergunakan sebagai alat untuk melegitimasi ataupun melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada. Namun demikian, sejak era reformasi, pendidikan sudah mengarah pada peran perubahan menuju tatanan sosial yang adil dan demokratis. Dalam praktiknya, dunia pendidikan di tanah air masih jauh dari harapan tersebut. Model UAN yang hanya mengandalkan pada bidang studi tertentu dan hanya memberi stimulus pada otak kanan hanya akan menambah persoalan di bidang pendidikan karena menganggap bidang studi lain tidak penting dan tidak memberi ruang bagi pengembangan potensi siswa. Hal ini diperparah dengan proyek LKS yang menggijurkan guru daripada tugas mulia mencerdaskan anak bangsa.

Pendidikan, seharusnya ditujukan untuk memanusiakan manusia dengan menyumbangkan gagasan-gagasan yang demokratis dan berkeadilan serta memberikan apresiasi terhadap penegakan HAM, bukan sekadar menyiapkan sumber daya manusia untuk melanggengkan sistem, terlebih lebih sistem yang mapan (*status quo*).

Di bidang keagamaan, institusi agama tidak maksimal dalam menjadikan agama sebagai solusi konflik. Agama sekadar rutinitas yang tidak fungsional, serta tidak memberi ruang bagi penyadaran kritis umat beragama dalam melihat fenomena sosial yang berkembang. Bahkan, ideologi keagamaan sering melegitimasi kekerasan atas nama agama. Agama bukan menjadi *problem solving*, tetapi justru menjadi bagian dari akar persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pemahaman agama yang lebih rasional dan toleran, bukan doktrin-doktrin yang kaku. Hal ini menjadi tugas para *religious leader* untuk



melakukan perubahan cara berpikir berbasis pada visi keagamaan. Dengan cara berpikir yang rasional dan toleran serta mampu memerankan agama sebagai salah satu pijakan transformasi sosial, maka agama akan menjadi rahmat. Hal yang berbeda akan terjadi jika agama dijadikan sebagai cara melanggengkan sistem *status quo* atau bahkan untuk kepentingan individu atau kelompok politik.

Persoalan bangsa yang lain adalah kemiskinan dan pengangguran, yang angkanya semakin melambung, telah memunculkan kriminalitas baru akibat kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat moral dan pendidikan warga. Di bidang HAM, banyaknya kasus-kasus HAM yang belum selesai menyebabkan sikap pesimis warga masyarakat terhadap para penegak hukum. Begitu juga kasus-kasus korupsi yang sebenarnya merupakan fenomena gunung es, belum dapat diselesaikan secara maksimal.

Secara makro, sistem perekonomian negara berpijak pada paradigma pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang berpijak pada akar budaya konsumtif, materialistik, hedonistik, dan sebagainya sehingga memunculkan persaingan bebas, keserakahan dan eksploitasi tanpa batas. Begitu juga praktik neo-liberal yang mewujudkan pasar bebas, penghapusan subsidi sosial, privatisasi perusahaan telah dianggap masalah karena hanya menguntungkan kapital global. Hal ini juga ditengarai sebagai akar persoalan lingkungan, perebutan SDM, KKN, dan sebagainya.

Persoalan besar bangsa ini juga ditandai dengan menjamurnya KKN. Pemberantasan KKN sudah seharusnya menjadi prioritas yang paling utama, baik dari sisi teknis dan sistem maupun dari sisi moralitas dan agama. Jika tidak, maka proses pembangunan bangsa dan masyarakat akan terganjal. Bahkan, KKN menjadi akar persoalan bangsa karena KKN tidak sekadar mencuri uang, tetapi juga akan mengarah pada pembusukan moral dan merusak sistem yang berkeadilan dan bermartabat. KKN telah menjadi persoalan moral karena menjadikan pelaku tidak normal dalam berpikir, bertindak, dan bersikap, di samping juga merugikan masyarakat dan negara.

Untuk itu, maka perlunya konsep pemberantasan yang kongkret dan dapat dilaksanakan, yaitu dengan membebaskan manusia dari KKN dan takut melakukan KKN. Dalam hal ini, yang perlu dibenahi adalah moralitas dan mental manusianya dengan agama dan spiritualitas yang ditopang dengan perangkat hukum, lembaga, sistem, prosedur, transparansi, dan sebagainya. Akan tetapi, jika moralitas manusianya masih tidak normal, maka apapun perangkat pemberantasan KKN tidak akan maksimal karena pelaku akan mencari jalan terselubung dan menyeleweng dengan mengakali hukum. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang cukup menunjukkan hasil yang baik, tetapi kemampuan komisi tersebut sangat terbatas, baik dari sisi jumlah personal maupun banyaknya kasus yang seharusnya diselidiki. Dalam pemberantasan KKN, Kwik Kian Gie mengemukakan dua pilar penting, yaitu *Carrot* dan *Stick*. *Carrot* adalah pendapatan bersih pegawai yang mencukupi dan di atas standar. Hal ini akan menciptakan pra kondisi yang menghambat munculnya KKN. *Stick* adalah hukuman yang keras dan seberat-beratnya bagi pelaku.¹ Namun, kedua pilar itu sebenarnya lebih merupakan upaya untuk membuat prakondisi bebas KKN karena semua itu kurang maksimal jika tidak dibarengi dengan *up grade* otak para pegawai dan pejabat di negeri ini. Peran pendidikan dan agama begitu penting karena keduanya bisa menjadi filsafat hidup manusia yang mendasari seluruh perilaku kehidupan sehari-hari.

Dalam kehidupan sosial politik, tampak jelas politik identitas yang semakin menguat dalam ruang-ruang publik. Hal ini merupakan dampak dari hegemoni pemerintah rezim Orde Baru yang selama 32 tahun membungkam aspirasi dan ruang berekspresi bagi warga masyarakat. Politik identitas dan kebebasan berekspresi ini jika tidak terkendalai dapat menciptakan sentiment ideologi keagamaan, sentimen etnis, sektarianisme, hingga persinggungan identitas kelompok. Hal ini dapat memicu munculnya konflik horizontal dan berdampak pada munculnya disintegrasi bangsa.

AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL

Semua agama menganjurkan umatnya untuk tampil baik di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk bersikap baik kepada kalangan penganut agama-agama lain.² Ini adalah teologi keagamaan universal. Teologi ini sekaligus perlu dijadikan basis perilaku menuju kesalehan sosial. Agama dan umat beragama harus dibebaskan dari perseteruan dan konflik sosial di masyarakat.



Salah satu manifestasi dari teologi kerukunan adalah pola hubungan yang dialogis dan komunikatif antarpemeluk agama dan antaraliran suatu agama. Hal ini dianggap urgen untuk merumuskan paradigma sosial yang diambil dari nilai-nilai keagamaan. Paradigma sosial keagamaan yang dimaksud adalah paradigma yang digali dari semangat ketuhanan yang mampu menumbuhkan perilaku keagamaan baru yang lebih santun, toleran, pluralis dan humanis di masyarakat. Perilaku keagamaan yang dimaksud tentunya perilaku keberagamaan dalam konteks kehidupan sosial dalam arti luas.

Dengan terciptanya hubungan yang harmonis antarumat beragama, maka akan berimplikasi bagi penguatan masyarakat sipil dalam kerangka membangun negara. Di sinilah, makna teologi menjadi penting bukan sebagai pembatas antarkeimanan seseorang, tetapi sebaliknya sebagai perekat persamaan dalam membangun masyarakat. Seluruh agama memiliki ajaran teologis bahwa membangun masyarakat adalah tugas pemeluk agama dan perintah langit.

Untuk menuju ke arah kehidupan yang demikian, maka diperlukan upaya menjadikan teologi keagamaan sebagai landasan dalam gerakan *social salvation*,³ bukan menjadikan agama sebagai sumber persoalan. *Social salvation* dimaksudkan sebagai langkah menjadikan agama sebagai *problem solving* atas berbagai persoalan kemasyarakatan yang melingkupi masyarakat dan bukan menjadi persoalan di masyarakat.

Agama dan struktur sosial di masyarakat memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dari perspektif inilah membangun hubungan antarumat beragama menjadi begitu penting. Agama dan masyarakat merupakan bagian dari sistem sosial (fondasi dasar) dalam hubungan antara agama dan persaudaraan lintas agama. Hal itu dikarenakan manusia itu bersaudara, walaupun berbeda dalam menganut agama. Persaudaraan sebagai anak Adam itu muncul sebagai persaudaraan kemanusiaan yang sama-sama merupakan makhluk Tuhan.⁴ Oleh karena itu, konflik antarpemeluk agama merupakan tragedi kemanusiaan yang sulit diterima akal sehat, terlebih-lebih konflik itu membawa bendera agama.

Weber pernah mengungkapkan bahwa agama memiliki fungsi *salvasi* (pembebasan) yang berorientasi pada keagamaan, yang dapat mengubah perilaku keagamaan dalam konteks membentuk hubungan-hubungan sosial yang berpengaruh terhadap perubahan sosial.⁵ Oleh karena itu, diperlukan sikap komitmen dari masing-masing pemeluk agama untuk menjalin dan menciptakan hubungan antaragama yang lebih akrab.

Persoalan hubungan antaragama harus dilandaskan pada azas kemanusiaan universal.⁶ Artinya, hubungan kemanusiaan tidak perlu membedakan latar belakang sosial, politik, ideologi, etnis, dan agama. Untuk itulah, diperlukan forum-forum komunikasi lintas agama. Pertemuan-pertemuan dan lembaga-lembaga lintas agama yang mengedepankan aspek pluralisme dan humanitarisme, yang dewasa ini tumbuh subur merupakan indikasi awal akan semakin membaiknya hubungan antarpemeluk agama.

Hal ini sesuai dengan perspektif umum dalam sosiologi agama bahwa agama merupakan struktur sosial yang melengkapi sistem sosial yang ada. Sebagai subsistem sosial, maka agama dan manifestasinya dalam pemikiran dan perilaku keagamaan akan memiliki sifat saling bergantung dengan sub-sub sistem sosial di masyarakat. Artinya, hubungan antarumat beragama dan antaraliran dalam suatu agama akan menentukan tingkat harmonisasi sosial di masyarakat.

Oleh karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius, maka fungsi agama perlu lebih dibumikan sehingga agama tidak sekadar menjadi rutinitas ritual dan identitas kelompok saja. Agama harus mengambil peran pembebasan di masyarakat dengan mencegah kemungkaran dan ketidakadilan menuju tatanan khusus yang beradab.

Persoalan bangsa yang kian mencapai titik kritis, tentunya perlu diselesaikan secara komprehensif. Salah satunya dengan membangun moralitas beragama yang tidak menjadikan agama sebagai sekadar identitas atau bahkan sumber persoalan.

PENUTUP

Sebagai bagian dari sistem sosial, Islam merupakan kekuatan sekaligus potensi besar dalam upaya membangun bangsa. Oleh karena itu, Islam harus diperankan sebagai kekuatan yang inklusif, demokratis, dan pluralis sebagai prasarat membangun bangsa. Corak pemikiran Islam juga harus memiliki paradigma pergerakan sosio-kultural dengan berupaya menampilkan sosok Islam dalam kesadaran hidup sehari-hari dan membangun sistem kelembagaan masyarakat tanpa harus membawa bendera agama. Gerakan sosio-kultural cenderung pada gerakan penyadaran dan pemberdayaan masyarakat dan



sistem kelembagaannya sebagai komitmennya terhadap demokrasi dan terbentuknya masyarakat sipil yang mandiri. Melalui pemikiran Islam sebagai kekuatan kultural ini, maka Islam akan dapat ditampilkan sebagai *social salvation* (penyelamatan sosial).

Persoalan apapun yang dihadapi masyarakat dan bangsa ini, maka Islam harus ditampilkan sebagai faktor nilai yang menjadi komplemen bagi nilai-nilai yang lain dalam memberantas segala bentuk ketertindasan dan kemunduran masyarakat. Dengan menempatkan Islam sebagai *social salvation*, maka agama ini akan lebih dapat membumi dan melebarkan sayap-sayap nilainya sehingga tidak dianggap agama primitif yang jauh dari dinamika persoalan sosio-historis. Islam harus diperankan dalam kerangka pembebasan yaitu pembebasan masyarakat dari kemiskinan, pelanggaran HAM, keterbelakangan, KKN, dan sebagainya.

ENDNOTE

¹ Kwik Kian Gie "Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih kemandirian, Keadilan dan kemakmuran" dalam Musni Umar & Syukri Ilyas (Ed.), *Korupsi Musuh Bersama* (Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), hal. 2.

² Abdul Munir Mulkhan, *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 76.

³ *Social Salvation* adalah sebuah gerakan pembebasan masyarakat dari kemunduran, kebodohan dan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Lihat Philip Smith, *Cultural Theory* (Blackwell: Massachussets, 2001), hal. 14.

⁴ Harun Nasution *Islam Rasional* (bandung: Mizan, 1992), hal. 270.

⁵ Ralph Schoeder, *Max Weber and The Sociology of Culture* (London: Sage, 1992), hal. 12-14.

⁶ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi* (Bandung: Rosda, 1999), hal. 96.

DAFTAR PUSTAKA

Gie, Kwik Kian. 2004. "Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Keadilan dan Kemakmuran" dalam Musni Umar & Syukri Ilyas (Ed.), *Korupsi Musuh Bersama*. Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi.

Mulkhan, Abdul Munir. 1995. *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, Harun. 1992. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.

Schoeder, Ralph. 1992. *Max Weber and The Sociology of Culture*. London: Sage.

Smith, Philip. 2001. *Cultural Theory*. Blackwell: Massachussets.

Wahid, Abdurrahman. 1999. *Membangun Demokrasi*. Bandung: Rosda.